

Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam Mengatasi Kesenjangan Biaya Pendidikan

Sirda Eldita dan Umanto Umanto

Universitas Indonesia

Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

E-mail: sirda.eldita@ui.ac.id

Abstract: The Indonesia Smart Program (Program Indonesia Pintar/PIP) is a government initiative aimed at enhancing educational accessibility for children from economically vulnerable families. This study aims to analyze the effectiveness of PIP in reducing the personal education cost burden of students from poor and near-poor families at both primary and secondary education levels. Using a post-positivist approach, this research employs primary data obtained through interviews with representatives from the Educational Financing Service Center (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan/Puslapdik) and student beneficiaries of PIP, as well as secondary data from official government documents related to the program. The findings indicate that PIP has successfully reached over 18 million students annually, with fund disbursement exceeding the targeted allocation. However, the financial assistance provided only covers approximately 23% to 25% of the students' actual educational needs. This reveals a mismatch between the aid amount and the students' real requirements in the field. Further analysis highlights that the inadequacy of the financial support received, accessibility challenges in remote areas, and weak oversight of fund utilization constitute major challenges affecting the program's sustainability. Additionally, while data show an increase in the net enrollment rate (Angka Partisipasi Murni/APM) among the bottom 40% income group, the insufficient amount of financial assistance relative to students' actual needs hinders the program's effectiveness. The study also reveals geographic disparities in aid accessibility, driven by infrastructure limitations and restricted banking access in remote areas. Although PIP has proven effective in supporting educational access, optimizing its impact requires periodic adjustments to the assistance amount, an improved monitoring system, and enhanced distribution mechanisms to ensure a more significant impact in the future.

Keywords: effectiveness, educational costs, smart indonesia program

Abstrak: Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PIP dalam mengurangi beban biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin di jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dengan menggunakan pendekatan *post-positivist*, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan peserta didik penerima manfaat PIP, serta data sekunder dari dokumen resmi pemerintah berkaitan dengan Program Indonesia Pintar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP telah berhasil menjangkau lebih dari 18 juta peserta didik setiap tahunnya, dengan realisasi penyaluran dana melebihi target yang ditetapkan. Namun, besaran dana bantuan yang diberikan hanya mampu memenuhi 23% hingga 25% dari kebutuhan riil pendidikan peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan aktual peserta didik dilapangan. Analisis lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ketidakcukupan besaran bantuan yang diterima, kendala akses di daerah terpencil, serta lemahnya pengawasan penggunaan dana menjadi tantangan utama program ini yang mempengaruhi keberlanjutan program. Selain itu, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi

murni (APM) pada kelompok 40% pendapatan terbawah, besaran dana yang tidak sebanding dengan kebutuhan riil peserta didik dinilai menghambat efektivitas program. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya disparitas geografis dalam aksesibilitas bantuan, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses perbankan di daerah terpencil. Meskipun PIP efektif dalam mendukung akses pendidikan, namun untuk meningkatkan efektivitas program secara optimal, maka diperlukan adanya penyesuaian besaran bantuan secara berkala, sistem pengawasan, dan mekanisme penyaluran agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan di masa mendatang.

Kata kunci: efektivitas; biaya pendidikan; program indonesia pintar

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemudahan akses serta terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa pengecualian. Melalui pendidikan, peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal. Pendidikan tidak hanya berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat tetapi juga berperan sebagai katalis untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta sosial yang berkelanjutan. Peran pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam melawan arus globalisasi dalam rangka mempertahankan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai, etika, toleransi, tolong menolong yang dimiliki (Kholillah et al., 2022). Di Indonesia, akses terhadap pendidikan berkualitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Biaya pendidikan yang terus meningkat menjadi salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan pendidikan baik pada tingkat dasar maupun lanjutan sehingga menciptakan kesenjangan partisipasi dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi (Ye-yun, 2006). Sebagaimana ditekankan oleh Rahmatin & Soejoto (2017), bahwa kemiskinan akan berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, sehingga individu dari keluarga kurang mampu berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, bahkan terpaksa putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga (Nugroho et al., 2021).

Pentingnya pendidikan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu dengan memperkenalkan berbagai program bantuan seperti pinjaman, beasiswa bagi peserta didik dan subsidi pendidikan. Di Malaysia misalnya, terdapat Bantuan Awal Persekolahan (BAP) sebagai inisiatif pemerintah untuk meringankan beban finansial orang tua pada awal tahun ajaran. Sedangkan di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai program bantuan, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya personal pendidikan dan mendukung program rintisan wajib belajar 12 tahun dengan besaran dana yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda bergantung pada jenjang pendidikan masing-masing. Meskipun demikian, efektivitas program seperti PIP masih menghadapi tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterlambatan menerima

informasi data penerima PIP (Ahmad dalam Meiynana & Machdum, 2020), termasuk dalam hal pendistribusian bantuan (Dimmera & Purnasari, 2020) dan kebutuhan riil biaya pendidikan individu. Besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik setiap tahunnya dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Yusup dalam (Hamdi et al., 2020) seperti biaya transportasi atau peralatan sekolah lainnya terutama bagi peserta didik pada pendidikan kejuruan yang memerlukan tunjangan pendidikan pribadi yang lebih tinggi, sehingga akan berdampak pada angka putus sekolah. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keputusan orang tua dan peserta didik mengenai kelanjutan pendidikan anak, terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah, dipengaruhi oleh biaya personal pendidikan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, beban biaya ini seringkali menjadi faktor utama yang menentukan apakah seorang anak dapat melanjutkan sekolah atau tidak (Harahap et al., 2021).

Studi lain juga menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan seringkali terkendala oleh kendala administratif, kurangnya mekanisme pemantauan yang efisien, dan kesulitan dalam menghitung biaya pendidikan secara akurat dan komprehensif (Albrecht, 1993; Bettinger et al., 2012). Oleh karena itu pengukuran biaya personal pendidikan yang akurat dan berbasis kebutuhan nyata peserta didik sangat penting dilakukan untuk memastikan program bantuan pemerintah seperti PIP dapat mencapai sasaran dengan efisien dan efektif. Ketimpangan ekonomi di antara peserta didik dapat diidentifikasi secara lebih efektif melalui pengukuran biaya personal pendidikan. Sebuah studi yang dilakukan di Nepal oleh (Pandey, 2022) menunjukkan bahwa penghitungan biaya pendidikan yang komprehensif, seperti biaya langsung (buku dan seragam), biaya tidak langsung (transportasi dan uang saku), serta biaya peluang (pendapatan yang hilang karena bersekolah), berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Program PIP diluncurkan pertama kali pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun November 2014 (Siddik et al., 2022), dan mulai dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 memiliki target sasaran yang sangat fantastis setiap tahunnya, yaitu sebanyak 18 juta peserta didik. Berakhirnya masa kepemimpinan presiden ke-7 Indonesia ini, menjadi penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas program PIP dalam mencapai tujuannya, yaitu mendukung keberlanjutan pendidikan dasar hingga menengah.

Berdasarkan tinjauan literatur terdahulu, kajian mengenai efektivitas PIP masih bersifat umum yang hanya melihat efektivitas sebagai satu dimensi saja, seperti ketepatan penyaluran atau ketepatan pelaksanaan program, namun tidak melihat sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan awal kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mengurangi beban biaya personal pendidikan peserta didik kurang mampu di jenjang pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh serta mengevaluasi kesesuaian besaran dana PIP dengan kebutuhan riil biaya pendidikan peserta didik secara lebih mendalam dengan menggunakan beberapa indikator efektivitas. Hasil analisis ini diharapkan

dapat menjadi dasar saran perbaikan dan inovasi bagi pelaksanaan program selanjutnya agar lebih optimal dan adaptif dalam menjawab kebutuhan pendidikan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Pendekatan ini dianggap relevan untuk memahami efektivitas penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) secara mendalam mengingat bahwa program ini melibatkan berbagai aktor pelaksana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, yang akan menyajikan hasil temuan secara rinci dan menyeluruh mengenai efektivitas PIP. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan peserta didik penerima manfaat PIP. Sebagai penyelenggara di tingkat pusat, Puslapdik memiliki peran penting dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PIP. Wawancara dengan Puslapdik dilakukan untuk menggali informasi yang komprehensif terkait perencanaan, mekanisme penyaluran dana, ketercapaian sasaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Wawancara juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas PIP dari perspektif pihak penyelenggara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan dengan PIP dari situs resmi pemerintah maupun laporan pemerintah. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan dari data primer, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kuat. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan memetakan pola-pola yang relevan dengan efektivitas program, seperti tingkat ketercapaian sasaran, kecukupan besaran dana, dan tantangan dalam implementasi. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai keberhasilan PIP serta menawarkan rekomendasi strategis untuk peningkatan kebijakan di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn, karena memberikan fokus yang jelas pada pengukuran pencapaian tujuan program, sesuai dengan tujuan utama PIP yaitu untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Menurut (Dunn, 2018) pengukuran efektivitas merupakan bagian dari evaluasi kebijakan ataupun program. Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan. Dimana menurut Dunn (2018), efektivitas bukanlah konsep tunggal, yang hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan bersifat multi-dimensi yang harus mempertimbangkan dimensi lainnya. Oleh karena itu, dalam pengukuran efektivitas suatu kebijakan atau program, haruslah mempertimbangkan dimensi evaluasi lainnya seperti efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga pengukuran efektivitas kebijakan atau program menjadi lebih komprehensif dan lebih realistis, tidak hanya berfokus pada ketercapaian kebijakan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Gambaran Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023, merupakan program bantuan pemerintah dalam membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. PIP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, mencegah peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, dan menarik kembali anak putus sekolah ke sistem pendidikan formal maupun nonformal (Hamid et al., 2023). Mekanisme pengusulan PIP dimulai dari usulan satuan pendidikan melalui Dapodik, kemudian diverifikasi oleh dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebelum diusulkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melalui sistem informasi Program Indonesia Pintar (SiPintar). Selain itu, usulan PIP juga dapat berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan pemangku kepentingan lainnya (Persesjen, 2023). Adapun prioritas utama penerima PIP adalah peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan kondisi khusus seperti yatim piatu, berpotensi putus sekolah, terdampak bencana, korban musibah di daerah konflik, berkebutuhan khusus, serta peserta didik yang orang tua/walinya sedang menjalani hukuman pidana. Dalam pelaksanaannya, bantuan PIP disalurkan satu kali dalam satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan yang sama (Nelly Khairani Daulay et al., 2023; Persesjen, 2023).

Penyaluran dana PIP dilakukan melalui bank penyalur yang bekerjasama sama dengan Puslapdik, yaitu BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK, serta BSI untuk Provinsi Aceh. Bank penyalur yang telah ditunjuk tersebut menyalurkan dana PIP ke rekening tabungan atas nama peserta didik setelah melalui proses aktivasi rekening PIP terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya, PIP dikelola secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Puslapdik), provinsi (dinas pendidikan provinsi), kabupaten/kota (dinas pendidikan kabupaten/kota), hingga satuan pendidikan. Selain itu pelaksanaan PIP juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian atau lembaga terkait lainnya. Adanya kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat menjamin penyaluran bantuan yang efektif dan tepat sasaran.

Efektivitas Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin serta sebagai upaya pemerintah untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun (Yuliwati, 2022). Setelah hampir sembilan tahun PIP diimplementasikan, pengukuran efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi penting untuk dilakukan. Dalam evaluasi program, efektivitas kebijakan publik mengacu pada seberapa besar program tersebut dapat menghasilkan manfaat nyata sesuai dengan tujuan awal kebijakan dibuat (Liu et al., 2023), sedangkan dalam Mukherjee et al. (2021) evaluasi efektivitas dilakukan dengan melihat sejauh mana program tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ingin diselesaikan.

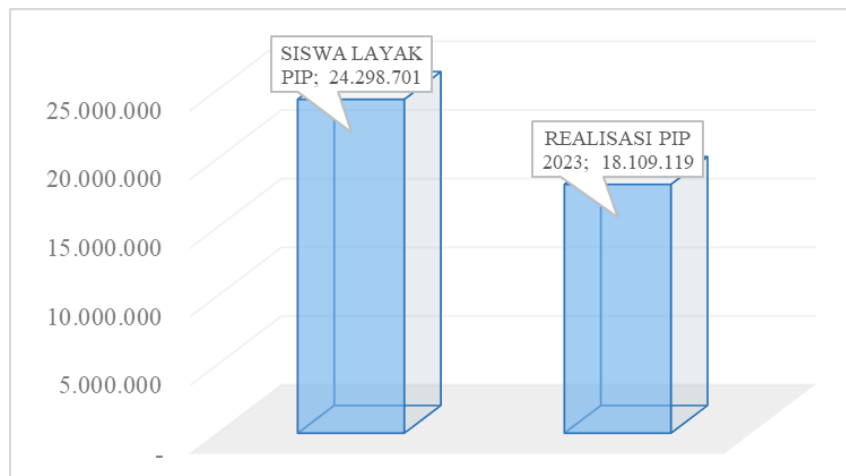
Evaluasi efektivitas PIP menunjukkan bahwa program ini telah mencapai beberapa hasil yang optimal dalam menjangkau target sasaran. PIP menargetkan mampu menjangkau 18 juta lebih peserta didik dengan anggaran rata-rata 10,3 triliun rupiah. Setiap tahunnya, realisasi penyaluran PIP selalu melebihi target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Tren Target Sasaran dan Realisasi Penyaluran PIP 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target Penerima PIP (Siswa)	Target Penyaluran Dana (Rp)	Realisasi Penyaluran (Siswa)	Realisasi Dana (Rp)
2020	17.940.992	9.638.971.300.000	18.092.891	9.638.971.300.000
2021	17.927.308	9.628.223.300.000	18.084.978	9.628.223.300.000
2022	17.927.308	9.628.223.300.000	17.953.268	9.628.223.300.000
2023	17.927.308	9.628.223.300.000	18.109.119	9.628.223.300.000
2024	18.594.627	13.447.710.600.000	18.615.000	13.447.710.600.000

Sumber: Sipintar, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 misalnya, target penerima PIP adalah sebanyak 18.594.627 peserta didik dengan anggaran sebesar Rp13.447.710.600.000,-. Dengan jumlah dana yang sama, realisasi penyaluran PIP berhasil melampaui target, yakni mencapai 18.615.000 peserta didik. adanya perbedaan target dengan realisasi ini, dikarenakan realisasi peserta didik kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk peserta didik penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima melebihi target awal. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan program untuk menyesuaikan dengan kondisi peserta didik di lapangan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran tetap menjadi hambatan utama, sehingga tidak semua peserta didik yang memenuhi kriteria layak PIP di Dapodik dapat menerima manfaat dari program ini (Gutama et al., 2022). Berdasarkan data perbandingan tahun 2023, PIP hanya mampu menjangkau 75% peserta didik layak PIP. Data ini tidak akan jauh berbeda jika disandingkan dengan realisasi pada tahun 2024.



Sumber: Informan (diolah kembali oleh peneliti), 2024

Gambar 1. Grafik Perbandingan Realisasi PIP Terhadap Peserta Didik Layak PIP

Selain berhasil mencapai target penyaluran, efektivitas PIP juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap akses pendidikan. Hal ini tercermin melalui analisis tren Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan sebuah indikator statistik untuk mengukur pencapaian pendidikan suatu negara dalam bentuk persentase, tanpa memperhatikan faktor usia (Diani Winarto et al., 2024). Meskipun analisis efektivitas PIP terhadap akses pendidikan melalui tren APK sulit untuk dilakukan karena terkendala oleh keterbatasan data agregat nasional yang tidak memisahkan target kelompok sasaran PIP. Namun pasca implementasi PIP, tren APK menunjukkan pola yang beragam antar jenjang pendidikan. APK SD/MI mengalami penurunan dari 110,5 menjadi 106,27 dalam 7 tahun, yang mengindikasikan adanya penurunan proporsi anak usia SD yang bersekolah. Sebaliknya, APK SMP/MTS cenderung meningkat dari 91,17 pada tahun 2015 menjadi 92,11 pada tahun 2022. Sedangkan APK SMA/SMK/MA juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, naik dari 78,02 menjadi 85,49 pada tahun 2022. Secara umum, terlihat adanya peningkatan partisipasi pada jenjang yang lebih tinggi, sementara partisipasi di jenjang SD/MI justru menurun seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Tren APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2015	110,50	91,17	78,02
2016	109,31	90,12	80,89
2017	108,50	90,23	82,84
2018	108,61	91,52	80,68
2019	107,46	90,57	83,98
2020	106,32	92,06	84,53
2021	106,20	92,80	85,23
2022	106,27	92,11	85,49

Sumber: BPS (diolah peneliti), 2024

Mengingat keterbatasan APK dalam mencerminkan akses pendidikan secara spesifik bagi kelompok sasaran PIP, maka diperlukan suatu indikator yang lebih terfokus. Tren Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah disajikan dalam tabel 3 sebagai alternatif lain untuk menggambarkan efektivitas PIP dalam meningkatkan akses pendidikan dikalangan penerima manfaat dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 3. Tren APM Berdasarkan Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2015	96,86	72,21	49,82
2016	96,93	74,98	49,90
2017	97,21	76,55	52,21
2018	97,60	77,02	53,38
2019	97,62	78,23	54,35

Sumber: BPS (diolah peneliti), 2024

Data di atas menunjukkan tren positif APM berdasarkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Data ini merepresentasikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat dengan status ekonomi terendah, dan digunakan sebagai indikator efektivitas PIP dalam menjangkau peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin (Diani Winarto et al., 2024). Secara umum, tren APM 40 persen terbawah berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan di semua jenjang pendidikan selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian oleh Mulyo Prayitno & Mami Hajaroh (2024) juga memprediksi bahwa APM 40% terbawah di Kabupaten Pati akan meningkat dari tahun 2022 hingga 2032. Meskipun penelitian tersebut hanya memprediksi peningkatan APM 40% terbawah di Kab. Pati, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, yang merupakan target utama PIP. Peningkatan ini dapat dijadikan sebagai indikasi awal potensi efektivitas PIP dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok sasarannya, terutama dengan menyediakan dukungan finansial untuk kebutuhan personal peserta didik, seperti buku, alat tulis, seragam, dan biaya transportasi serta kebutuhan pribadi lainnya.

Meskipun tren positif APM menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin, keberlanjutan dampak PIP terhadap angka putus sekolah dan kelangsungan pendidikan peserta didik masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dari perspektif keberlanjutan, data mengenai keberlanjutan pendidikan penerima PIP dan dampaknya terhadap angka putus sekolah masih sangat terbatas. Informan menyatakan kesulitan melacak keberlanjutan penerima PIP hingga tamat jenjang pendidikan karena mekanisme penentuan penerima yang bersifat tahunan dan bergantung pada data DTKS, P3KE, serta usulan dari pemangku kepentingan. Sifat data kemiskinan yang dinamis semakin mempersulit pelacakan ini. Lebih lanjut, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis

persentase penerima PIP yang putus sekolah dan faktor-faktor penyebabnya. Informan hanya memberikan dugaan umum bahwa PIP bersifat sebagai bantuan, bukan jaminan untuk tetap bersekolah, dan faktor-faktor lain seperti ketidakminatan peserta didik, perpindahan, atau mengikuti orang tua merantau dapat menjadi penyebab peserta didik putus sekolah. Selain itu faktor keluarga seperti tingkat pendidikan orangtua, kesulitan ekonomi, tekanan akademik, dan pergaulan bebas juga menjadi faktor penyebab peserta didik putus sekolah (Atasayar et al., 2024). Diperlukan adanya studi longitudinal dan pengumpulan data yang lebih sistematis untuk memahami dampak PIP terhadap keberlanjutan pendidikan dan angka putus sekolah.

Dari perspektif motivasi belajar, PIP diharapkan mampu memberikan dorongan bagi peserta didik untuk terus belajar dengan menyediakan dukungan finansial untuk kebutuhan personal. Meskipun belum ada penelitian internal yang secara spesifik mengevaluasi dampak ini, beberapa hasil studi eksternal menunjukkan adanya korelasi positif antara PIP dan prestasi belajar peserta didik. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syofyan et al. (2022) mengenai dampak PIP terhadap prestasi belajar peserta didik menunjukkan bahwa PIP telah memberikan dampak yang sangat bagus terhadap prestasi belajar peserta didik di SMPN 2 Luhak Nan Duo. Penelitian oleh Kayah (2021) juga menunjukkan adanya pengaruh PIP dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran PPKN. Disamping itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa PIP berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik di SMPN 8 Paguyaman, meskipun tidak signifikan (Binti et al., 2023). Tetapi beberapa hasil penelitian lainnya tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara PIP dan peningkatan semangat belajar peserta didik.

Dari sisi penggunaan dana, dalam hal ini Sistem Informasi Program Indonesia Pintar (SIPINTAR) telah berfungsi sebagai wadah untuk melacak progres penyaluran dana di seluruh jenjang pendidikan. Namun, kelemahan signifikan masih ditemukan terutama karena belum adanya mekanisme yang memantau penggunaan dana oleh peserta didik setelah pencairan, sehingga evaluasi dampak program menjadi kurang komprehensif. Selain itu, cakupan evaluasi yang dilakukan pihak pelaksana yang hanya berbasis sampel sering kali tidak cukup representatif, khususnya untuk menggambarkan kondisi di wilayah yang menghadapi tantangan implementasi yang berbeda.

Secara keseluruhan, Program Indonesia Pintar berpotensi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti penguatan sistem monitoring penggunaan dana, peningkatan cakupan evaluasi, dan pengembangan mekanisme distribusi yang lebih inklusif.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, evaluasi efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya dilihat dari dimensi pencapaian target penyaluran dana tetapi juga dinilai dari dimensi lainnya seperti seberapa efisien dan mencukupi program ini dalam menjawab kebutuhan peserta didik dari keluarga kurang mampu (Dunn, 2018). Oleh karena ini bagian Pembahasan ini akan membahas efektifitas PIP berdasarkan lima indikator lainnya.

Efisiensi

Menurut Dunn (2018), efisiensi berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan manfaat. Dalam administrasi publik, efisiensi merujuk pada upaya mencapai tujuan seperti mengatasi permasalahan sosial, pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menekankan biaya seminimal mungkin (Ortina, 2023). Sehingga dalam konteks PIP, efisiensi berarti bahwa dana publik yang dikeluarkan untuk program ini harus memberikan dampak yang maksimal terhadap akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan meminimalkan pemborosan dan keterlambatan penyaluran.

Dalam pelaksanaannya, Pokja PIP melibatkan 32 staf pelaksana pusat, dan didukung oleh dana manajemen operasional yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengolahan data, monitoring, supervisi dan koordinasi dengan pelaksanaan di tingkat daerah serta kegiatan pendukung lainnya. Dalam penyaluran dana, Puslapdik bekerja sama dengan tiga bank penyalur, yaitu BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK serta BSI untuk penerima PIP di provinsi Aceh. Dalam proses tersebut, Puslapdik memastikan tidak ada biaya atau *fee* yang dikenakan kepada bank penyalur maupun peserta didik. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan efisiensi pengelolaan dana, sehingga seluruh alokasi dana dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Namun, lamanya proses penyaluran dana yang rata-rata memakan waktu 2 bulan, mengindikasikan adanya inefisiensi yang dapat mengurangi manfaat program bagi penerima (Amin et al., 2024). Variasi waktu pencairan antar daerah dan jenjang pendidikan, yang disebabkan oleh tahapan penyaluran dan kinerja bank penyalur, menunjukkan perlunya standarisasi dan optimalisasi proses pencairan. Meskipun terdapat sedikit keterlambatan dalam proses aktivasi dan penarikan dana PIP, proses tersebut sudah sesuai dengan mekanisme PIP (Kuspriyanto, 2024). Strategi pemisahan Surat Keputusan (SK) menjadi dua jenis, yaitu SK Nominasi dan SK Pemberian, bertujuan untuk meminimalkan dana yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas negara. SK Nominasi diterbitkan terlebih dahulu untuk peserta didik yang belum memiliki rekening aktif, sebagai bentuk konfirmasi calon penerima PIP dan dorongan untuk segera membuka rekening. Setelah rekening aktif terkonfirmasi, barulah SK Pemberian diterbitkan yang sekaligus mencairkan dana bantuan. Namun, strategi ini belum cukup efektif mempercepat proses pencairan. Lamanya waktu antara

penerbitan SK Nominasi dan SK Pemberian, yang pada akhirnya memperpanjang waktu tunggu peserta didik menerima bantuan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi alur proses, termasuk mekanisme verifikasi rekening dan sinkronisasi data antara Puslapdik, bank penyalur, dan sekolah, untuk mempercepat pencairan dana PIP.

Dari sisi penerima manfaat, Peserta didik penerima PIP memprioritaskan penggunaan dana untuk membeli kebutuhan personal sekolah (Sholikhah, 2019) seperti buku, seragam, dan sepatu. Jika terdapat sisa dana, maka digunakan untuk keperluan *study tour*. Meskipun mereka menganggap penggunaan tersebut sudah efisien. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan dana PIP untuk *study tour* sebenarnya tidak sesuai peruntukan, mengingat kegiatan tersebut tidak bersifat wajib dan bukan merupakan biaya personal pendidikan yang ditanggung PIP. Kurangnya pemahaman peserta didik akan tujuan dan penggunaan dana PIP menyebabkan dana PIP yang diterima digunakan untuk membiayai keperluan diluar kebutuhan sekolah (Harun, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan sosialisasi dan pengawasan yang lebih jelas kepada penerima manfaat mengenai penggunaan dana PIP yang sesuai ketentuan. Selain itu, meskipun mekanisme pencairan dana PIP dianggap mudah oleh peserta didik tanpa adanya hambatan dari sekolah, dinas pendidikan maupun bank penyalur, namun akses ke bank penyalur yang jauh mengharuskan pencairan harus dilakukan secara kolektif melalui sekolah (Kuspriyanto, 2024). Kemudahan proses pencairan justru bertentangan dengan keluhan peserta didik terkait lamanya waktu penyaluran yang mengindikasikan adanya kesenjangan persepsi antara pelaksana dan penerima manfaat mengenai efisiensi program.

Selanjutnya sebagai pihak pengelola pusat, Puslapdik menghadapi kesulitan dalam memantau penggunaan dana, mengingat target penerima lebih dari 18 juta peserta didik, sehingga mendelegasikan tugas tersebut kepada sekolah dan dinas pendidikan, yang juga memiliki keterbatasan kapasitas. Meskipun laporan yang diterima Puslapdik menunjukkan penggunaan dana umumnya untuk keperluan pendidikan seperti pembelian buku dan seragam, ditemukan juga penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, seperti pembayaran SPP dan pembelian kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya mekanisme monitoring yang lebih efektif untuk memastikan dana PIP digunakan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyalahgunaan (Nadia Nadia et al., 2024). Saat ini, strategi Puslapdik fokus pada percepatan penyaluran dana melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, bank penyalur, dan sekolah. Upaya ini meliputi optimalisasi waktu penyaluran, aktivasi rekening, dan penanganan kendala pencairan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya untuk memperlancar penyaluran dana, tetapi juga memastikan dana digunakan sesuai peruntukan.

Kecukupan

Dimensi kecukupan (*adequacy*) pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018), dimana program yang dilaksanakan sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin (Damanik & Marom, 2016). Dalam konteks PIP kecukupan merujuk pada sejauh mana program ini mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin secara memadai, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan pendidikannya.

Bantuan sosial PIP disalurkan kepada penerima 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, dengan besaran yang diterima oleh tiap-tiap peserta didik berbeda berdasarkan jenjang pendidikan seperti yang terlihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Besaran Unit Cost PIP Per Peserta Didik Per Tahun

Jenjang	Unit Cost/Tahun	
	2015 s.d. 2023	2024
SD	450.000,-	450.000,-
SMP	750.000,-	750.000,-
SMA	1.000.000,-	1.800.000,-
SMK	1.000.000,-	1.800.000,-

Sumber: Sipintar (diolah peneliti), 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa besaran dana PIP yang diterima oleh peserta didik pada jenjang SD/SMP tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2024, yaitu sebesar Rp450.000,- per peserta didik per tahun untuk jenjang SD dan Rp750.000,- per peserta didik per tahun untuk jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK besaran dana yang diterima oleh peserta didik dari tahun 2015 s.d. 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,- per peserta didik per tahun, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp800.000,- sehingga menjadi Rp1.800.000,- per peserta didik per tahun.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana PIP digunakan oleh peserta didik untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, dan transportasi, besaran bantuan tersebut dirasa belum mencukupi. Penelitian Sholikhah (2019) di SMPN 2 Gedangdari Kab. Gunung Kidul menunjukkan bahwa PIP hanya mampu memenuhi 55% hingga 58% biaya personal pendidikan. Sedangkan data penelitian ini menunjukkan bahwa PIP baru memenuhi sekitar 25% dari total kebutuhan peserta didik, sehingga belum mencapai tingkat kecukupan yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan pada tahun 2020 yang menemukan adanya selisih yang signifikan antara besaran dana yang diterima peserta didik dengan kebutuhan riil peserta didik (Zamjani et al., 2020). Temuan lain juga menunjukkan bahwa dana PIP tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran dana (Safitri et al., 2021). Selain itu pernyataan informan juga memperkuat

temuan ini, bahwa nominal PIP saat ini terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan peserta didik secara memadai. Keterbatasan ini semakin terasa di era digital, dimana perangkat digital dan akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sektor pendidikan saat ini, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengakses materi ajar, dan menyelesaikan tugas kapan pun dan di mana pun (Gultom, 2020). Bahkan penelitian Liu & Gao (2021) menunjukkan bahwa akses terhadap komputer dan internet di rumah sangat penting bagi peserta didik di era digital untuk meningkatkan prestasi akademik. Sedangkan besaran dana PIP yang diterima oleh peserta didik tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan baru peserta didik tersebut. Penelitian Karningsih (2021) mengenai implementasi PIP pada masa pandemi Covid-19 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana PIP dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik masih belum optimal, mengingat kebutuhan peserta didik yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yusup et al. (2019), hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dana yang diterima masih belum cukup bahkan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik di SMP Negeri 7 Salatiga.

Kenaikan biaya pendidikan dari tahun ke tahun ini apabila tidak diimbangi dengan kenaikan *unit cost* PIP, dapat berdampak pada menurunnya aksesibilitas pendidikan, terutama bagi peserta didik dari keluarga berekonomi rendah, sebagaimana hasil penelitian Wang (2023) yang menyatakan bahwa daerah miskin dengan tekanan ekonomi cenderung memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Temuan ini semakin mempertegas pentingnya kecukupan bantuan pendidikan. Tren besaran *unit cost* PIP yang cenderung konstan, sedangkan inflasi terus terjadi selama hampir satu dekade semakin mengerus nilai riil bantuan tersebut. Nominal yang ada mungkin memadai pada tahun pertama atau kedua PIP diluncurkan, namun tidak lagi mencukupi kebutuhan peserta didik pada saat ini. Kebutuhan personal peserta didik seperti buku, alat tulis, sepatu, seragam, dan transportasi sudah pasti mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, sehingga kenaikan harga ini dapat mengancam akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin (Noora, 2023). Meskipun PIP bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, namun besaran *unit cost* yang tidak mengalami kenaikan membuat bantuan tersebut tidak relevan dengan realitas ekonomi yang ada, para orang tua semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Bahkan sebagian orang tua mempekerjakan anak-anak mereka di luar jam sekolah untuk membantu perekonomian keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada waktu belajar mereka (Noora, 2023).

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan besaran bantuan PIP, meskipun telah dilakukan upaya pengajuan kenaikan anggaran. Faktanya, hanya *unit cost* untuk jenjang SMA dan SMK yang mengalami kenaikan pada tahun 2024, sementara jenjang SD dan SMP masih tetap. Ketidaksesuaian antara besaran bantuan dan kenaikan harga barang semakin memperkecil daya beli dana PIP dan mengurangi efektivitasnya dalam membantu peserta didik

dari keluarga miskin atau rentan miskin memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Hal ini mengindikasikan perlunya kajian ulang mengenai besaran dana PIP agar lebih sesuai dengan realitas ekonomi dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan.

Penelitian mengenai kebutuhan biaya personal peserta didik juga pernah dilakukan oleh Perdana (2019), penelitian ini menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data utama untuk melakukan perhitungan biaya personal peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Rata-rata biaya personal pendidikan peserta didik berdasarkan penelitian tersebut disajikan pada tabel 5. Untuk mempersempit cakupan, penulis hanya menyajikan estimasi biaya dari tahun 2023 saja dalam penelitian ini.

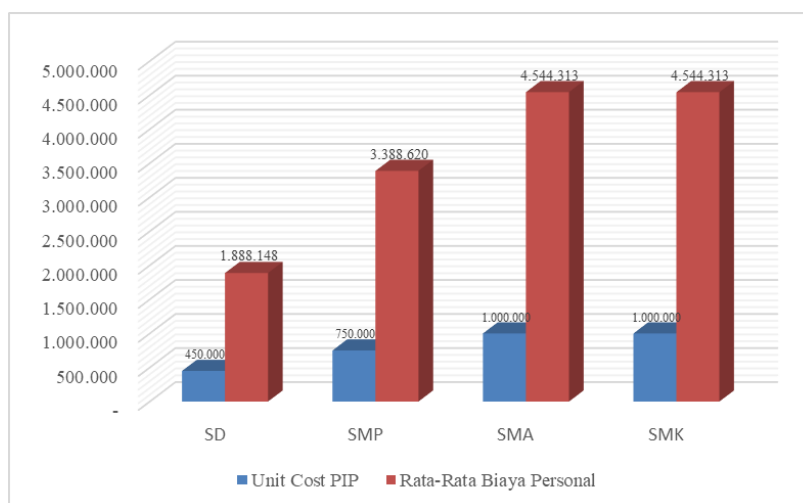
Tabel 5. Rata-Rata Biaya Personal Pendidikan Peserta Didik Tahun 2023

Komponen	SD	SMP	SMA/ SMK
Seragam	268.301	370.318	353.442
Bahan Belajar	39.002	61.697	61.107
Alat Tulis	82.511	103.485	108.104
Kursus	3.868	5.544	4.995
Study Tour	9.081	40.933	55.848
Uang saku	1.275.549	2.052.116	2.708.851
Transportasi	209.836	754.527	1.251.966
Total	1.888.148	3.388.620	4.544.313

Sumber: Perdana (2019); diolah peneliti

*Data berdasarkan kelompok pendapatan 40% terbawah, sesuai target penerima PIP

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari kelompok pendapatan 40% terbawah pada tahun 2023. Jika data tersebut disandingkan dengan besaran unit cost PIP, terdapat disparitas yang signifikan antara unit cost PIP dan kebutuhan biaya personal peserta didik seperti yang terlihat pada grafik 2 di bawah.



Sumber: Perdana (2019) & Sipintar Puslapdik; diolah peneliti, 2024

Gambar 2. Grafik Perbandingan Unit Cost PIP dengan Rata-Rata Kebutuhan Biaya Personal Peserta Didik

Grafik 2 di atas dengan jelas menunjukkan bahwa *unit cost* PIP jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata kebutuhan biaya personal peserta didik di semua jenjang pendidikan. Unit cost PIP saat ini rata-rata hanya mampu memenuhi 24% dari kebutuhan personal peserta didik.

Kesetaraan

Berbeda dengan kesamaan, dimensi kesetaraan (*equity*) dalam kebijakan publik menurut Dunn (2018) mengacu pada keadilan dan pemerataan distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat, sedangkan dalam Gutama et al. (2022) prinsip keadilan dalam kebijakan PIP tercermin dalam landasan hukum, tujuan, dan manfaat program yang berfokus pada pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penyaluran PIP, dimensi kesetaraan memastikan bagaimana bantuan terdistribusi secara merata kepada penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Program Indonesia Pintar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan PIP. Tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan gender, suku atau lainnya. Besaran *unit cost* yang berbeda-beda bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan jenjang pendidikan. Misalnya, peserta didik jenjang SD menerima bantuan yang lebih kecil dibandingkan dengan jenjang SMP, sedangkan jenjang SMP mendapatkan lebih kecil daripada SMA dan SMK, sehingga bantuan terdistribusi secara merata. Meskipun PIP menyatakan memberikan akses yang sama bagi semua anak dari keluarga miskin atau rentan tanpa diskriminasi, temuan penelitian menunjukkan adanya potensi ketimpangan akses berdasarkan faktor geografis, karena minimnya akses teknologi dan informasi di beberapa wilayah (Pratama & Suprayogi, 2024). Ketergantungan pada sistem pengusulan *online* melalui Sipintar dan Dapodik dapat menguntungkan daerah dengan akses internet yang baik dan merugikan daerah terpencil dengan infrastruktur digital yang terbatas, sehingga akan berdampak pada kesenjangan akses, kesempatan dan kualitas pendidikan (Della Aprilia Kartika Putri et al., 2023). Meskipun adanya kebijakan perpanjangan waktu pengusulan untuk mengakomodasi kendala akses internet tersebut, hal ini belum tentu cukup untuk menjamin kesetaraan akses. Sementara itu, penggunaan data kemiskinan seperti DTKS dan P3KE serta status layak PIP di Dapodik sebagai dasar penentuan kuota penerima PIP per wilayah merupakan langkah positif untuk memastikan keadilan distribusi bantuan. Namun, perlu dipastikan bahwa data tersebut merupakan data yang akurat, terkini, dan representatif, sehingga benar-benar mencerminkan kondisi kemiskinan dan kerentanan di masing-masing daerah. Karena DTKS kerap kali mengalami

exclusion error maupun *inclusion error* akibat lambatnya proses pemutakhiran dan validasi data yang belum optimal (Tatu Sius et al., 2024), sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian dana PIP (Pratama & Suprayogi, 2024). Selain itu, perlu adanya mekanisme untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi keluarga yang mungkin terjadi setelah data dikumpulkan, sehingga bantuan PIP dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pencairan dana PIP di daerah terpencil terutama yang jauh dari bank penyalur, menghadapi hambatan akibat sulitnya akses transportasi dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima manfaat (Ahmad, 2018). Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pencairan, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas program karena sebagian dana bantuan habis untuk menutupi biaya perjalanan, untuk mengatasi kendala ini, pelaksana program telah berkoordinasi dengan bank penyalur untuk menerapkan strategi jemput bola. Selanjutnya, diperlukan juga strategi yang lebih inovatif seperti pemanfaatan teknologi keuangan digital atau kerja sama dengan PT Pos melalui *cash transfer* atau Pos Giro *Cash*, yaitu aplikasi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bansos yang dinilai efektif dalam menjangkau daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) (Nurhidayah & Adiwati, 2025), guna memastikan bahwa dana PIP dapat diterima secara cepat dan utuh oleh penerima manfaat tanpa menambah beban biaya.

Responsivitas

Dimensi responsivitas (*responsiveness*) digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu merespon kebutuhan dan masukan dari target yang menjadi sasaran kebijakan (Dunn, 2018). Responsivitas suatu kebijakan juga dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut merefleksikan keinginan publik, seperti penelitian di Spanyol yang menunjukkan adanya korelasi antara opini masyarakat dengan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang kesejahteraan (Cicuéndez Santamaría, 2021). Sedangkan media berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah yang mendorong responsivitas kebijakan terhadap isu tertentu (Chen, 2023). Dalam konteks PIP misalnya, responsivitas mampu melihat apakah terdapat mekanisme yang efektif bagi peserta didik dan orang tua untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait program PIP serta seberapa responsif pelaksana terhadap masukan tersebut.

Responsivitas program PIP menunjukkan gambaran yang cukup positif. Penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah dan dinas pendidikan selaku pelaksana sangat mendukung adanya program PIP ini (Haqiqi & Prabawati, 2019). Meskipun besaran dana yang diterima dirasa belum mencukupi, penerima manfaat merasa puas dengan adanya program PIP, namun akses informasi terkait program masih terbatas dan tidak diberikan secara utuh (Riq & Yuniningsih, 2020). Sebagian besar penerima manfaat mengandalkan informasi dari sekolah dan guru, dengan minimnya

pemanfaatan saluran informasi resmi seperti Sipintar dan media sosial PIP. Hal ini mengindikasikan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai berbagai kanal informasi PIP yang tersedia. Terkait mekanisme penyampaian keluhan, Puslapdik menyediakan beragam kanal, mulai dari *WhatsApp*, portal Lapor, layanan *Zoom*, hingga menu aduan di Sipintar yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah atau dinas pendidikan. Setiap aduan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Puslapdik dengan cepat dan transparan. Namun, perlu dipertanyakan seberapa efektif sosialisasi mekanisme aduan ini kepada penerima manfaat, mengingat beberapa saluran seperti layanan *Zoom* dan Sipintar kurang familiar bagi peserta didik. Selain itu adanya sistem berjenjang untuk penyampaian aduan (Peserta didik/orang tua - Sekolah - Dinas Pendidikan - Pusat) berpotensi memperlambat proses penanganan keluhan dan menciptakan hambatan akses bagi penerima manfaat. Studi menunjukkan bahwa struktur yang lebih horizontal terbukti lebih efisien dalam pengelolaan informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang responsif, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat (Bhatt & Garge, 2023). Adapun respon pemerintah terhadap keluhan PIP dan masukan cukup beragam, mulai dari klarifikasi, solusi, hingga pertimbangan untuk perubahan kebijakan.

Ketepatan

Dimensi ketepatan menilai apakah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan sudah tepat dan relevan dengan permasalahan yang ingin diatasi (Zakirin & Arifin, 2022). Proses penyaluran dana PIP melibatkan serangkaian tahapan yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas program, baik melalui kategori DTKS/P3KE maupun usulan dari pemangku kepentingan. Untuk usulan pemangku kepentingan, mekanisme diawali dengan pengusulan calon penerima PIP oleh satuan pendidikan melalui Dapodik. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Validasi ini meliputi pengecekan kelengkapan data dan kesesuaian dengan kriteria penerima PIP. Dinas pendidikan kemudian menyusun rekapitulasi calon penerima PIP dan mengirimkannya ke Puslapdik melalui aplikasi Sipintar. Setelah menerima data usulan dari dinas pendidikan, Puslapdik selanjutnya menerbitkan SK Nominasi bagi calon penerima yang belum memiliki rekening di bank penyalur. SK Nominasi ini menjadi syarat bagi peserta didik atau orang tua/wali untuk melakukan aktivasi rekening di bank penyalur yang ditunjuk (BRI, BNI, atau BSI untuk provinsi Aceh). Proses aktivasi melibatkan verifikasi identitas dan pembukaan rekening baru atas nama peserta didik. Setelah rekening aktif, Puslapdik kemudian menerbitkan SK Pemberian PIP. SK Pemberian inilah yang menjadi landasan proses penyaluran dana PIP dari Puslapdik ke rekening penerima PIP. Terakhir, peserta didik atau orang tua/wali dapat mencairkan dana bantuan tersebut melalui teller, ATM atau agen perbankan seperti Brilink, BSI Griya, dan BLG (BNI Layanan Gerak) yang bekerjasama dengan bank penyalur. Adanya pemisahan SK Nominasi

dan SK Pemberian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan meminimalkan dana PIP dikembalikan ke kas negara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pelaksanaan PIP sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu merujuk pada Persesjen No. 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Persesjen tersebut memuat informasi mengenai mekanisme pengusulan hingga pengaduan. Adanya proses administrasi yang tepat ini dapat mencegah terjadinya penyaluran yang salah sasaran, seperti halnya penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data penerima bantuan (Salsabila et al., 2023). Selain itu untuk memastikan pelaksanaan PIP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjamin bahwa PIP benar-benar disalurkan kepada yang membutuhkan, pengawasan PIP dilakukan oleh lembaga internal dan eksternal seperti Inspektorat Jenderal dan BPK serta lembaga pengawasan lainnya sesuai kewenangan. Namun, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan tersebut dalam mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian implementasi PIP di lapangan. Hal ini dikarenakan masih adanya kebocoran dalam penyaluran bantuan sosial yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan terutama dalam hal validasi data penerima manfaat (Firmansyah & Solikin, 2019). Meskipun sejauh ini tidak terdapat pro dan kontra masyarakat yang signifikan terkait pelaksanaan PIP, namun sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman terkait keberlanjutan SK PIP, dimana sebagian peserta didik beranggapan bahwa jika tahun ini mereka menerima SK PIP, maka pada tahun-tahun berikutnya mereka juga akan otomatis menjadi penerima PIP. Padahal, PIP tidak menjamin keberlanjutan PIP setiap tahunnya. Penerbitan SK PIP dilakukan berdasarkan usulan dari pemangku kepentingan serta mempertimbangkan ketersediaan data kemiskinan, seperti yang tercantum dalam DTKS dan P3KE. Adanya kesalahpahaman ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih efektif mengenai ketentuan program.

Dalam hal ketepatan penggunaan dana, meskipun peserta didik mengaku menggunakan dana PIP untuk kebutuhan pendidikan, beberapa peserta didik juga memanfaatkannya untuk keperluan lain, seperti *study tour*, membeli kebutuhan pokok, atau membayar SPP. Perlu dipahami bahwa meskipun SPP dan *study tour* termasuk dalam biaya pendidikan, keduanya bukanlah bagian dari biaya personal pendidikan peserta didik yang ditanggung oleh PIP (Wahyuni et al., 2024), melainkan termasuk dalam biaya operasional pendidikan yang berada di luar cakupan PIP. Hal ini menunjukkan lemahnya sosialisasi PIP yang diterima oleh penerima manfaat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan seperti monitoring, namun luasnya cakupan penerima PIP membuat monitoring ini tidak mampu menjangkau seluruh penerima, sehingga masih ditemukan adanya siswa yang menerima dana tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya (Dimmera & Purnasari, 2020). Oleh karena itu, pengawasan dan sosialisasi perlu diperkuat untuk memastikan dana PIP benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) telah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Namun, besaran dana yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata peserta didik, terutama di jenjang SD dan SMP yang tidak mengalami kenaikan sejak 2015, menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan dampak dari program ini. Selain itu, distribusi PIP yang mencakup berbagai wilayah telah memperluas jangkauan PIP, meskipun masih terdapat kendala aksesibilitas di daerah terpencil akibat keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi yang sulit ke bank penyalur. Sistem pengawasan juga telah membantu memastikan sebagian besar dana digunakan untuk keperluan pendidikan, meskipun masih diperlukan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Secara keseluruhan, PIP telah memberikan dampak dalam mendukung pendidikan anak-anak Indonesia, sekaligus menunjukkan potensi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dengan perbaikan pada beberapa aspek strategis.

SARAN

Untuk mengoptimalkan kebijakan Program Indonesia Pintar, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap besaran *unit cost* PIP secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan riil peserta didik, termasuk mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan untuk mengakses internet dan perangkat teknologi pendidikan. Dengan adanya penyesuaian ini, maka diharapkan PIP dapat lebih relevan terhadap kebutuhan nyata peserta didik. Selanjutnya strategi pencairan dana yang lebih efisien juga perlu diterapkan, terutama bagi daerah yang menghadapi kesulitan akses ke bank penyalur. Beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan adalah pencairan dana dengan mekanisme seperti *cash transfer* atau Pos Giro *Cash* melalui kerja sama dengan PT POS Indonesia, guna memastikan penerima manfaat dapat mengakses bantuan tanpa beban tambahan biaya transportasi. Terakhir, pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme monitoring berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam penggunaan dana PIP. Disamping itu, sosialisasi yang lebih intensif dan terarah juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat tentang ketentuan dan penggunaan dana PIP, sehingga PIP dapat berjalan dengan lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. (2018). Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19, 523–542.
- Albrecht, D. (1993). Student loans : an effective instrument for cost recovery in higher education? *World Bank Research Observer*, 8, 71–90. <https://doi.org/10.1093/WBRO/8.1.71>
- Amin, C., Zamzam, I., Reviane, I. T. A., Duko, F., Hasnin, M., Muhammad, N. I., Hartarto, R. B., & Anwar, C. J. (2024). Social assistance performance on local economic development: evidence from island regions in East Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 97–109. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20988>
- Atasayar, M., Girgin, N., Süler, K., Eyvaz, M., Dağal Girgin, U., & Şahin, A. (2024). Perception of School Dropout with the Perspective of School Administrators. *Turkish Journal of Applied Social Work*. <https://doi.org/10.54467/trjasw.1383239>.
- Badan Pusat Statistik. (2020, 7 Februari). Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2018-2019. Diakses pada 13 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3OSMy/angka-partisipasi-murni--apm---40--ke-bawah---menurut-daerah-tempat-tinggal.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024, 15 Februari). Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan. Diakses pada 13 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U1doQIVFVIBkVmh3TjBkVFJFWldNa3hDV TNSelp6MDkjMw==/angka-partisipasi-murni-apm-dan-angka-partisipasi-kasar-apk-menurut-jenjang-pendidikan.html?year=2022>
- Bettinger, E., Long, B., Oreopoulos, P., & Sanbonmatsu, L. (2012). The Role of Application Assistance and Information in College Decisions: Results from the H&R Block FAFSA Experiment*. *Quarterly Journal of Economics*, 127, 1205–1242. <https://doi.org/10.1093/QJE/QJS017>
- Bhatt, R. M., & Garge, D. (2023). Efficiency in Emergency: A Perception Study of Hierarchical Versus Flat Organizational Structures for Joint Disaster Response in the Bay of Bengal Region. *Strategic Analysis*, 47(1), 61–78. <https://doi.org/10.1080/09700161.2023.2183580>
- Binti, S., Canon, S., Hasiru, R., Hinel, R., & Mahmud, M. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Journal of Economic and Business Education*, 1(3), 59–69. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i3.21671>
- Chen, C. (2023). Policy responsiveness and media attention. *Policy & Politics*, 51(3), 602–625. <https://doi.org/10.1332/030557321X16841402132985>
- Cicuéndez Santamaría, R. (2021). Opinión pública y políticas públicas: la sensibilidad de los ciudadanos y la receptividad de los gobiernos en España. *Revista Del CLAD Reforma y Democracia*, 80, 109–148. <https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n80.a260>
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 221–232. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12486>
- Della Aprilia Kartika Putri, Nanda Aulia Rahmawati, & Rahayu Rahmawati. (2023). Analisis Konflik Dan Dampak Keterbelakangan Dalam Akses Jaringan Internet Dan Listrik Di Desa Terate Yang Terikat Dengan PTPN XII Kotta Blater. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 260–271. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1773>
- Diani Winarto, N., Siti Nurjanah, & Aditya Pratama. (2024). The Effect of Economic Gini Ratio, Lecturer Ratio, and Number of Universities Ratio on the Gross Enrollment Rate (Ger) of Higher Education at Indonesia in 2020–2022. *International Journal of Applied and Advanced Multidisciplinary Research*, 2(3), 185–200. <https://doi.org/10.59890/ijaamr.v2i3.1548>
- Dimmera, B., & Purnasari, P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: an integrated approach* (Sixth Edition). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Firmansyah, A. D., & Solikin, A. (2019). Who Gains From Social Assistances? Rastra, Pip, And Pkh Programs In Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 53–70. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.372>
- Gultom, F. E. (2020). The Role Of Internet In Learning. *BAHAS*, 30(4). <https://doi.org/10.24114/bhs.v30i4.18573>
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 389. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.35872>
- Hamdi, S., Setiawan, R., & Mursyadad. (2020). *Evaluation of the implementation of Indonesia Pintar program in vocational school | Hamdi | Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/32603>
- Hamid, A., Rais, M. S., Rois, M. I., Salamun, S., Yonhendri, Y., Zulfan, A., & Oyong, L. (2023). Decision Support System for Program Indonesia Pintar Recipients Using the Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method. *Journal of Information System Exploration and Research*, 1(2). <https://doi.org/10.52465/joiser.v1i2.157>
- Haqiqi, N. M. Y. A., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Di Smp Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 7(8). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n8.p%p>
- Harahap, D. A., Amanah, D., Gunarto, M., & Purwanto, P. (2021). The Decision Of Choosing A University: The Impact Of Education Costs. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*. <https://doi.org/10.33884/JIMUPB.V9I2.3712>
- Harun, T. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.31602/as.v6i1.3858>
- Karningsih, K. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i02.2276>
- Kayah, K. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Ppkn) Di Smk Pgri 2 Bojonegoro. *EDUTAMA*. <https://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE>
- Kemendikbudristek. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta.
- Kemendikbudristek. (2023). Persesjen Nomor 20 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Jakarta.
- Kemendikbudristek. (2024). Persesjen Nomor 19 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Jakarta.
- Puslapdik. (2023). Laporan Kinerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Tahun 2022. Jakarta.
- Puslapdik. (2023). Progran Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah 2023. [Presentasi PowerPoint]. Rakor PIP Dikdas Region 7, Jakarta.
- Kholillah, M., Furnamasari, Y., & Anggraeni Dewi, D. (2022). Peran Pendidikan Dalam Menghadapi Arus Globalisasi. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6, 515–518. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2508>
- Kuspriyanto, M. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Sma Negeri 11 Seram Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 7(1), 62–68. <https://doi.org/10.37504/map.v7i1.614>
- Liu, Y., & Gao, J. (2021). *The Impact of Home Computer and Internet Device on Students' Academic Performance in the Digital Age*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.048>
- Liu, Y., Lee, H., & Berry, F. (2023). How and When Democratic Values Matter: Challenging the Effectiveness-Centric Framework in Program Evaluation. *Public Performance &*

- Management Review*, 46(4), 820–845. <https://doi.org/10.1080/15309576.2023.2184839>
- Meiynana, & Machdum, S. V. (2020). Potensi Pendukung Pelaksanaan Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(2), 139–154. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v13i2.381>
- Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: a review. *Policy Sciences*, 54(2), 243–268. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8>
- Mulyo Prayitno, & Mami Hajaroh. (2024). Analysis of Gross Enrollment Ratio, Net Enrollment Ratio, and School Enrollment Ratio Trends at the Elementary School Level. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 4(1), 18–36. <https://doi.org/10.46229/elia.v4i1.809>
- Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, & Ramadhani Setiawan. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 181–194. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521>
- Nelly Khairani Daulay, Asep Toyib Hidayat, & Shelfia Shepty. (2023). Penentuan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Siswa Kurang Mampu dengan Metode Preference Selection Index (PSI) Berbasis Web. *Bulletin of Computer Science Research*, 4(1), 121–128. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v4i1.296>
- Noora, R. N. (2023). The Challenges Faced By Low-Income Families Due To The Increase Of Higher Price Of Learning Materials In Sri Lanka: A Research Based On Nintavur Ds Division. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*, 7(10), 37–41. <https://doi.org/10.33564/IJEAST.2023.v07i10.005>
- Nugroho, H., Sunarto, K., Pattinasarany, I., Kusumadewi, L., Hardjana, S., Paat, J., Paat, L., Wisudo, B., Setiadi, A., Kristiyanti, E., Wardhani, M., Prasetyo, A., & Kurniawan, K. (2021). *Kesenjangan dan Pendidikan di Indonesia*. files/928/Sunarto et al. - 2021 - Kesenjangan dan Pendidikan di Indonesia.pdf
- Nurhidayah, U., & Adiwati, M. R. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pos Giro Cash PT Pos Indonesia KCU Surabaya 60000 pada Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1626–1630. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7074>
- Ortina, G. (2023). Economic Efficiency of Public Administration in the Field of Digital Development. *Economic Affairs*, 68(3). <https://doi.org/10.46852/0424-2513.3.2023.21>
- Pandey, B. (2022). Analysis of Economic Cost of Secondary Level Education in Nepal. *Patan Prospective Journal*. <https://doi.org/10.3126/ppj.v2i2.52878>
- Perdana, N. S. (2019). Program Indonesia Pintar: Analisis Perhitungan Biaya Satuan Peserta Didik Dalam Upaya Peningkatan Akses Pendidikan. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*, 1(1). <https://doi.org/10.30998/simponi.v1i1.406>
- Pratama, S. C., & Suprayogi, Y. (2024). Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 799–811. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12927046>
- Rahmatin, U. Z., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 127–140. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v1n2.p127-140>
- Riq, E. A. A., & Yuniningsih, T. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 240–251. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i1.29792>
- Safitri, N. A., Nurlatifah, N., Hakim, R. L., & Hidayat, A. (2021). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Putri Siti Hajar Bandung. *JlEM (Journal of Islamic Education Management)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24235/jiem.v5i1.8892>
- Salsabila, H., Ninghardjanti, P., & Susilowati, T. (2023). Implementasi e-government di masa pandemi dalam pelayanan publik oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. *JIKAP*

- (*Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*), 7(5), 406.
<https://doi.org/10.20961/jikap.v7i5.47081>
- Sholikhah, E. (2019). Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (Pip) Oleh Siswa Smpn 2 Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. *FOUNDASIA*, 9(1).
<https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26160>
- Siddik, F., Agnes Yohana Silalahi, Indri E Y Napitupulu, Zahwa Alya Azzahra Nst, Putri Nurul Afifah Bangun, Hannah Selly Melinda Sagala, & Franklin Asido Rossevelt. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar (Sd) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Medan. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum Dan Humaniora*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.55904/histeria.v1i1.120>
- Syofyan, A., Irsadunas, I., & Anggraini, V. Y. (2022). Analisis Dampak Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik di SMPN 2 Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 596–612. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.586>
- Tatu Sius, K., Y Palan Peten, Y., Vemmilia Raju, K., L Kaha, H., & Nyong, F. (2024). Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 116–125. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.207>
- Wahyuni, E. S., Wicaksono, L., & Ulfah, M. (2024). Educational Financing Management in Improving the Quality of Education at MTS Walisongo Pontianak. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 10(1), 314. <https://doi.org/10.58258/jime.v10i1.6654>
- Wang, Q. (2023). Factors Affecting the Rate of Child Dropout from Multiple Angles. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/ehss.v12i.7619>
- Ye-yun, L. (2006). A Study on the Determination of the Cost of Personal Tuition in Regular Institutions of Higher Education. *Education and Economy*. https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-on-the-Determination-of-the-Cost-of-Tuition-Ye-yun/5cfd9aea3fa82f1dd471f57f069d9812f3f5f8a8?utm_source=consensus
- Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110–118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>
- Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 5(1), 256–271. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/599>
- Zamjani, I., Herlinawati, H., Perdana, N. S., Azizah, S. N., & Widiputera, F. (2020). *Biaya satuan dan manajemen linimasa Program Indonesia Pintar (PIP)*. <https://repository.kemdikbud.go.id/22294/>